

**IDENTIFIKASI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TANJUNG
KETAPANG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN**

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh :
Sheilla Zona Zavira
NRP. 173060025



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PASUNDAN

2024

**PERNYATAAN ORIGINALITAS KARYA TULIS DAN TIDAK MELAKUKAN
PLAGIARISME**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sheilla Zona Zavira
NRP : 173060025
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Teknik
Judul Tugas Akhir : Identifikasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung
Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan

Menyatakan bahwa karya tulis ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiarisme, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan waktu yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bandung, Agustus 2024



(Sheilla Zona Zavira)

HALAMAN PENGESAHAN I

Identifikasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Tolobali

Kabupaten Bangka Selatan

Tugas Akhir

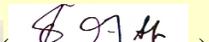
Oleh

Nama : Sheilla Zona Zavira

NRP : 173060025

Bandung, 2024

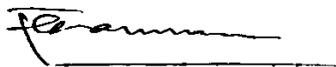
Menyetujui,

- | | | |
|---------------------|----------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | DR. IR.Firmasyah., MT. | () |
| 2. Pembimbing Utama | DR. IR.Firmasyah., MT. | () |
| 3. Co-Pembimbing | Gerry Andrika Rismana, ST., MT. | () |
| 4. Penguji I | Meyliana Lisanti, ST., M.Si. | () |
| 5. Penguji II | Apriadi Budi Raharja, ST., M.Si. | () |

Menyetujui

Koordinator TA dan Sidang
Sarjana

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota





(Dr. Ir. Firmansyah., MT.)

(Deden Syarifudin, ST., MT.)

**IDENTIFIKASI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TANJUNG KETAPANG
KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN**



Nama : Sheilla Zona Zavira
NRP : 173060025
e-mail : Sheilla23zona@gmail.com

Mengetahui dan Menyetujui:

Pembimbing 1

Pembimbing II

Dr. Ir. Firmansyah., MT.

Gerry Andrika Rismana, ST., MT.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS
TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sheilla Zona Zavira
NRP : 173060025
Judul Tugas Akhir : Identifikasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung
Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan

Demi kepentingan akademik bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menyetujui untuk memberikan karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir/Proyek Akhir ini kepada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) beserta perangkatnya.

Dengan demikian Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta (HaKi).

Bandung, Agustus 2024

Yang Menyatakan,



(Sheilla Zona Zavira)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan yang baik hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan Judul “Identifikasi Permukiman Kumuh Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan)”. Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan Tugas Akhir yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung.

Tugas Akhir ini berisikan 5 (lima) BAB yang berisikan tentang permukiman kumuh terhadap tingkat kekumuhan permukiman dan faktor penyebab permukiman kumuh yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil kajian ini sebagai upaya dalam memberikan informasi terkait permukiman kumuh dalam tingkat permukiman dan faktor penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Ketapang yang dipengaruhi oleh masyarakat dan kebijakan pemerintah. Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai permukiman kumuh dalam mengatasi masalah permukiman kumuh dari Masyarakat .

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengaharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

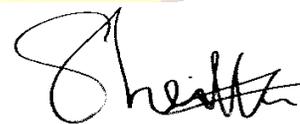
Selanjutnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Bapak Deden Syarifudin, S.T., M.T selaku pimpinan prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan.
2. Bapak Dr.Ir. Firmansyah MT serta Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir, yang telah bersedia dalam membimbing dan memberi pengarahan serta bantuan moral maupun materil bagi penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. Bapak Gerri Adrika Rismana, S.T., M.Si selaku Co-pembimbing penyusun atas kesediaan dan keikhlasannya yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta bantuan moral maupun materil bagi penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini.

4. Seluruh bapak dan ibu dosen beserta seluruh staff Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Pasundan yang selalu membantu untuk memenuhi keperluan tugas akhir ini dengan baik.
5. Orang tua saya, Bapak Supirman dan Ibu Siti Norliza serta Adik saya Egha Ovhi Novanza dan Azzakia Firnanda yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan tugas akhir ini.
6. Sahabat terbaik Maria Anjela Tutoburak, Indah Arnenda, Samsiah dan Dea yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan motivasi dan bantuan, sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
7. Kepada Seluruh Asrama Putri Isba Bandung yang sudah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mohon maaf. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus. Akhir kata, saya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya memohon untuk saran dan kritikan untuk membangun agar kedepannya lebih baik lagi, saya berharap dikemudian hari skripsi dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Bandung, Agustus 2024



Penulis

ABSTRAK

Peningkatan Kawasan Kumuh tidak terlepas dari disebabkan peningkatkan jumlah penduduk yang tinggi, ketersediaan lahan permukiman baru, serta tingkat kontrol yang rendah. Begitu pula yang terjadi pada kawasan kumuh di Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kondisi permukiman yang semakin memburuk, sehingga hal ini telah mempengaruhi beberapa aspek serta Kondisi lingkungan yang buruk dan juga menyebabkan penurunan dari kualitas lingkungan pada daerah tersebut. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengidentifikasi tingkat kekumuhan yang ada di Kelurahan Tanjung Ketapang yang meliputi : Kondisi Bangunan, Kondisi Drainase, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Kondisi Pengelolaan Persampahan dan Kondisi Proteksi kebakaran serta Penelitian ini juga memberikan arahan penanganan kawasan kumuh yang tepat di Kelurahan Tanjung Ketapang dalam peningkatan serta pengendaliannya yang semestinya. Metode yang digunakan metode kuantitatif dan teknik pengumpulan data seperti observasi lapangan, wawancara dan kuesioner, sehingga didapatkan data primer dari proses dan objek sasaran kawasan, data sekunder dari pengumpulan data yang tersedia di instansi terkait, kuisisioner dan wawancara, guna dalam memperoleh informasi serta data – data yang lebih akurat. Adapun hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa kawasan kumuh di Kelurahan Tanjung Ketapang terjadi dikarenakan kurangnya peningkatan sarana dan prasarana yang berskala lingkungan seperti beberapa kondisi ; bangunan, drainase, jalan lingkungan, penyediaan air minum, pengolahan limbah, pengolahan persampahan, dan proteksi kebakaran. Hal ini sebagai peningkatan kualitas lingkungan Kelurahan Tanjung Ketapang dengan pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh dalam faktor penyebab permukiman meliputi beberapa kondisi lingkungan Kelurahan Tanjung Ketapang.

Kata Kunci: *Tingkat Kekumuhan, Faktor penyebab kekumuhan*

ABSTRACT

The increase in slum areas cannot be separated from the high population increase, the availability of new residential land, and low levels of control. Likewise, what happened in the slum area in Tanjung Ketapang subdistrict, Toboali subdistrict, South Bangka district, Bangka Belitung Islands was due to uncontrolled high population growth and increasingly deteriorating residential conditions, so this has affected several aspects and poor environmental conditions and also caused a decline in environmental quality in the area. The aim of the research that will be carried out is to identify the level of slums in Tanjung Ketapang Village which includes: Building Conditions, Drainage Conditions, Environmental Road Conditions, Drinking Water Supply Conditions, Waste Water Management Conditions, Waste Management Conditions and Fire Protection Conditions as well as this research also provides direction for proper handling of slum areas in Tanjung Ketapang Village in improving and controlling them properly. The method used is quantitative methods and data collection techniques such as field observations, interviews and questionnaires, so that primary data is obtained from processes and objects in the target area, secondary data from data collection available at relevant agencies, questionnaires and interviews, in order to obtain information and data - more accurate data. The results of the research analysis show that slum areas in Tanjung Ketapang Village occur due to a lack of improvement in facilities and infrastructure on an environmental scale, such as several conditions; buildings, drainage, environmental roads, drinking water supply, waste processing, waste processing, and fire protection. This is to improve the environmental quality of Tanjung Ketapang Village by preventing and improving slum settlements. Factors that cause settlements include several environmental conditions in Tanjung Ketapang Village.

Keywords: *Level of Slums, Factors causing slums*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | i |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Permasalahan | 4 |
| 1.3 Tujuan dan Sasaran | 5 |
| 1.3.1 Tujuan | 5 |
| 1.3.2 Sasaran | 5 |
| 1.4 Ruang Lingkup..... | 5 |
| 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah | 5 |
| 1.4.2 Ruang Lingkup Substansi | 9 |
| 1.5 Metodologi..... | 9 |
| 1.5.1 Metode Pendekatan..... | 9 |
| 1.5.2 Variabel Penelitian..... | 10 |
| 1.5.3 Metode Pengumpulan Data..... | 12 |
| 1.5.4 Metode Analisis | 19 |
| 1.6 Kerangka Pikir | 28 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 29 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 30 |
| 2.1 Tinjauan Teori..... | 30 |
| 2.1.1 Pengertian Permukiman Kumuh | 30 |
| 2.1.2 Karakter Permukiman Kumuh | 32 |
| 2.1.3 Unsur Permukiman | 41 |
| 2.1.4 Jenis-Jenis Permukiman..... | 43 |
| 2.1.5 Faktor Pembentuk Permukiman Kumuh..... | 44 |
| 2.1.6 Tingkat Permukiman Kumuh..... | 47 |
| 2.1.7 Ciri-Ciri Permukiman Kumuh | 52 |
| 2.1.8 Infrastruktur Permukiman Kumuh | 52 |

| | | |
|--|--|------------|
| 2.2 | Tinjauan Kebijakan..... | 54 |
| 2.1.1 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Perumahan dan kawasan permukiman..... | 54 |
| 2.1.2 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 55 | 55 |
| 2.1.3 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh | 59 |
| 2.1.4 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman..... | 60 |
| 2.3 | Studi Terdahulu..... | 62 |
| BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH | | 72 |
| 3.1 | Gambaran Umum Kebijakan tentang Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh..... | 72 |
| 3.1.1 | Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan | 72 |
| 3.1.2 | Penetapan SK Permukiman Kumuh..... | 75 |
| 3.2 | Gambaran Umum Kabupaten Bangka Selatan..... | 80 |
| 3.2.1 | Kondisi Geografis | 80 |
| 3.2.2 | Topografi..... | 83 |
| 3.2.3 | Iklim..... | 84 |
| 3.2.4 | Hidrologi..... | 84 |
| 3.3 | Gambaran Umum Kecamatan Toboali | 85 |
| 3.3.1 | Geografis..... | 85 |
| 3.3.2 | Penduduk dan Perekonomian..... | 88 |
| 3.3.3 | Fasilitas di Kecamatan Toboali..... | 89 |
| 3.4 | Gambaran Umum Kelurahan Tanjung Ketapang..... | 91 |
| 3.4.1 | Geografis..... | 91 |
| 3.4.2 | Kependudukan | 94 |
| 3.4.3 | Kondisi Eksisiting Permukiman Kumuh..... | 96 |
| 3.4.4 | Kondisi Faktor Penyebab Permukiman Kumuh..... | 109 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | | 116 |
| 4.1 | Analisis Tingkat Kekumuhan Kelurahan Tanjung Ketapang | 118 |
| 4.1.1 | Kondisi Bangunan..... | 119 |
| 4.1.2 | Kondisi Jaringan Jalan | 123 |
| 4.1.3 | Kondisi Penyediaan Air Minum | 126 |
| 4.1.4 | Kondisi Drainase Lingkungan | 129 |

| | | |
|---|---|------------|
| 4.1.5 | Kondisi Pengelolaan Air Limbah..... | 134 |
| 4.1.6 | Kondisi Pengelolaan Persampahan | 137 |
| 4.1.7 | Kondisi Proteksi Kebakaran..... | 141 |
| 4.1.8 | Tingkat Kekumuhan Permukiman Kelurahan Tanjung Ketapang | 144 |
| 4.2 | Analisis Faktor Penyebab Permukiman Kumuh | 146 |
| 4.2.1 | Faktor Sosial Budaya | 146 |
| 4.2.2 | Faktor Ekonomi..... | 148 |
| BAB V KESIMPULAN | | 153 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 155 |
| LAMPIRAN A DESAIN SURVEY TUGAS AKHIR..... | | 157 |
| LAMPIRAN B SK PEMBIMBING TUGAS AKHIR | | 164 |
| LAMPIRAN C FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR PEMBIMBING 1 | | 165 |
| LAMPIRAN D FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR PEMBIMBING 2 | | 167 |
| LAMPIRAN E SURAT PENGANTAR PENELITIAN | | 168 |
| LAMPIRAN F DOKUMENTASI HASIL SURVEY..... | | 170 |
| LAMPIRAN G FORM WAWANCARA..... | | 17 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penanganan kumuh sudah diamanatkan dalam berbagai dokumen kebijakan, bahkan menjadi salah satu target dan pemerintah menetapkan target nasional dalam RPJMN 2020-2024. dalam pengkajian tentang permukiman kumuh, pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut, Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik.

Berdasarkan SK Bupati Bangka Selatan Nomor:188.45/252/BP3MD/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan profil kawasan permukiman dan permukiman kumuh, konsep, kebijakan, dan strategi penanganan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, program penanganan kawasan

permukiman dan permukiman kumuh. Menurut sumber dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Toboali, bahwa pemukimanyang paling banyak berada di permukiman disepanjang pinggiran pantai dan pusat kota, yang masing–masing tersebar di beberapa kecamatan seperti kecamatan Lepar pongok, Kecamatan Toboali, dan Kecamatan Pulau Besar dengan masing–masing mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, pertanian, perkebunan, dan untuk yang paling banyak di Kecamatan Toboali dengan 6 titik lokasi kawasan permukiman yang berada di pinggiran pantai salah satu kawasan yang paling banyak yang itu berada di kelurahan Tanjung ketapang.

Isu lingkungan terkait kawasan permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari Kecamatan Taboali, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Pulau besar, yang masing-masing kecamatan memiliki tingkat kekumuhan yang berbeda dimana kecamatan dengan tingkat kekumuhan yang tertinggi berada di Kecamatan Taboali Kelurahan Tanjung Ketapang. (Dokumen RP2KPKPK) Kelurahan Tanjung Ketapang umumnya muncul karena ditimbulkan oleh kurangnya kurang terkontrolnya pengawasan pemerintah atas peningkatan jumlah penduduk yang telah menyebabkan banyaknya permukiman yang tidak teratur di Kelurahan Tanjung Ketapang. Tipologi kawasan kumuh di Tanjung Ketapang yaitu Daerah Permukiman Kumuh dengan Karakter Permukiman Pesisir. Kawasan Tanjung Ketapang memiliki permasalahan antara lain Rumah tidak layak huni tergolong masih banyak untuk kawasan tanjung ketapang dan suka damai karna banyak juga rumah tidak permanen dan semi permanen di kawasan ini. Penyediaan jalan juga merupakan salah satu permasalahan karna masih ada jalan tanah dan tidak tersedia atau terpeliharanya drainase di kawasan tanjung ketapang dan kawasan suka damai sehingga menyebabkan sering terjadi genangan saat hujan maupun air laut sedang pasang. Masalah yang juga mirip dengan kelurahan lainnya adalah masalah keteraturan bangunan. Bahwa harga tanah di kawasan ini sudah sangat tinggi sehingga untuk melakukan peningkatan kualitas drainase dengan memperlebar saluran menjadi sangat sulit dilakukan. Untuk pemenuhan air bersih warga banyak menggunakan air sumur maupun sumur bor. Untuk sampah di kawasan Tanjung Ketapang masih banyak warga yang membuang sampah pada Bandar hal ini juga menyebabkan terjadinya penyumbatan pada Bandar sehingga pada saat terjadi hujan sering terjadi genangan. Di kawasan tanjung ketapang masih ada warga yang belum memiliki sarana MCK sehingga masih ada warga yang MCK sembarangan. Berdasarkan sumber (*Dokumen RP2KPKPK*)

Penentuan kawasan permukiman kumuh prioritas di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan nilai tingkat kumuh terdiri Kawasan yaitu, Desa Sadai nilai 2,41% (kumuh ringan), Desa Tanjung Ketapang nilai 45% (kumuh ringan), Desa Permis nilai 14,08% (kumuh ringan), Desa Batu Betumpang nilai 6,97% (kumuh ringan). Kelangkaan prasarana dan sarana dasar permukiman menjadikan masyarakat tak dapat merasakan fasilitas permukiman yang layak ditambah dengan ketidakmampuan memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman yang ada, dan masih rendahnya kualitas permukiman baik secara fungsional, lingkungan maupun visual wujud lingkungan, merupakan upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. secara fungsional Kelurahan Tanjung Ketapang, sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai untuk bisa disesuaikan dengan permukiman yang berkelanjutan.

<https://id.scribd.com/document/578808284/Dokumen-RP2KPKPK-Kab-Bangka-Selatan-Tahun.2020>

1.2 Rumusan Permasalahan

Kelurahan Tanjung Ketapang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Toboali, Kelurahan Tanjung Ketapang merupakan daerah pesisir dan terletak dibagian Barat Kota Toboali. Secara administratif Kelurahan Tanjung Ketapang memiliki luas wilayah luas 40 Km², mayoritas penduduk di Kelurahan Tanjung Ketapang adalah Melayu Kampung, yang mana dengan mata pencaharian terbesar penduduk sekitar adalah nelayan, walaupun ada beberapa diantara penduduk Kelurahan Tanjung Ketapang yang bermata pencaharian pertanian dan perkebunan Dilihat dari mata pencaharian yang lebih dominan adalah nelayan.

Mayoritas penduduk yang paling banyak bernelayan adalah pendatang dari pulau – pulau kecil, pedesaan dan kota luar lainnya yang menetap di Kelurahan Tanjung Ketapang untuk mencari nafkah dalam kebutuhan hidup mereka sehari – hari, dengan semakin banyaknya pendatang yang datang dan menetap sehingga terjadi pertumbuhan penduduk yang semakin tidak terkontrol yang mana mempengaruhi dari kualitas fisik lingkungan di Kelurahan Tanjung Ketapang semakin menurun, terutama dari aspek pembangunan pada permukiman yang tidak teratur, sehingga terjadinya permukiman kumuh yang Dari beberapa kategori permukiman kumuh yang telah ditetapkan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada tahun 2020 maka terdapat berbagai kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai di Kelurahan Tanjung Ketapang seperti , Terdapat jaringan jalan permukiman yang buruk, Kualitas lingkungan permukiman yang kotor, belum terpenuhi jaringan drainase pada limbah sehingga banyak dari setiap rumah penduduk yang langsung membuang limbah rumah tangganya ke Permukaan laut sekitar, belum adanya jaringan air bersih, dikarenakan akan kebutuhan air bersih masyarakat masih menggunakan sumur galian yang masih tercemar oleh permukaan air laut dan limbah cair. Dalam hal ini maka Kelurahan Tanjung Ketapang merupakan wilayah yang tepat untuk dikategorikan sebagai daerah permukiman kumuh, dikarenakan telah memenuhi kriteria dari beberapa kondisi yang telah dijelaskan.

https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-8074-bab_1.pdf

Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana Identifikasi tingkat kekumuhan yang ada di Kelurahan Tanjung Ketapang ?
2. Bagaimana faktor penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Ketapang?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu Identifikasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Taboali Kabupaten Bangka Selatan.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka dirumuskan beberapa sasaran, yaitu :

1. Teridentifikasinya Tingkat kekumuhan yang ada di Kelurahan Tanjung Ketapang.
2. Teridentifikasinya Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Ketapang

1.4 Ruang Lingkup

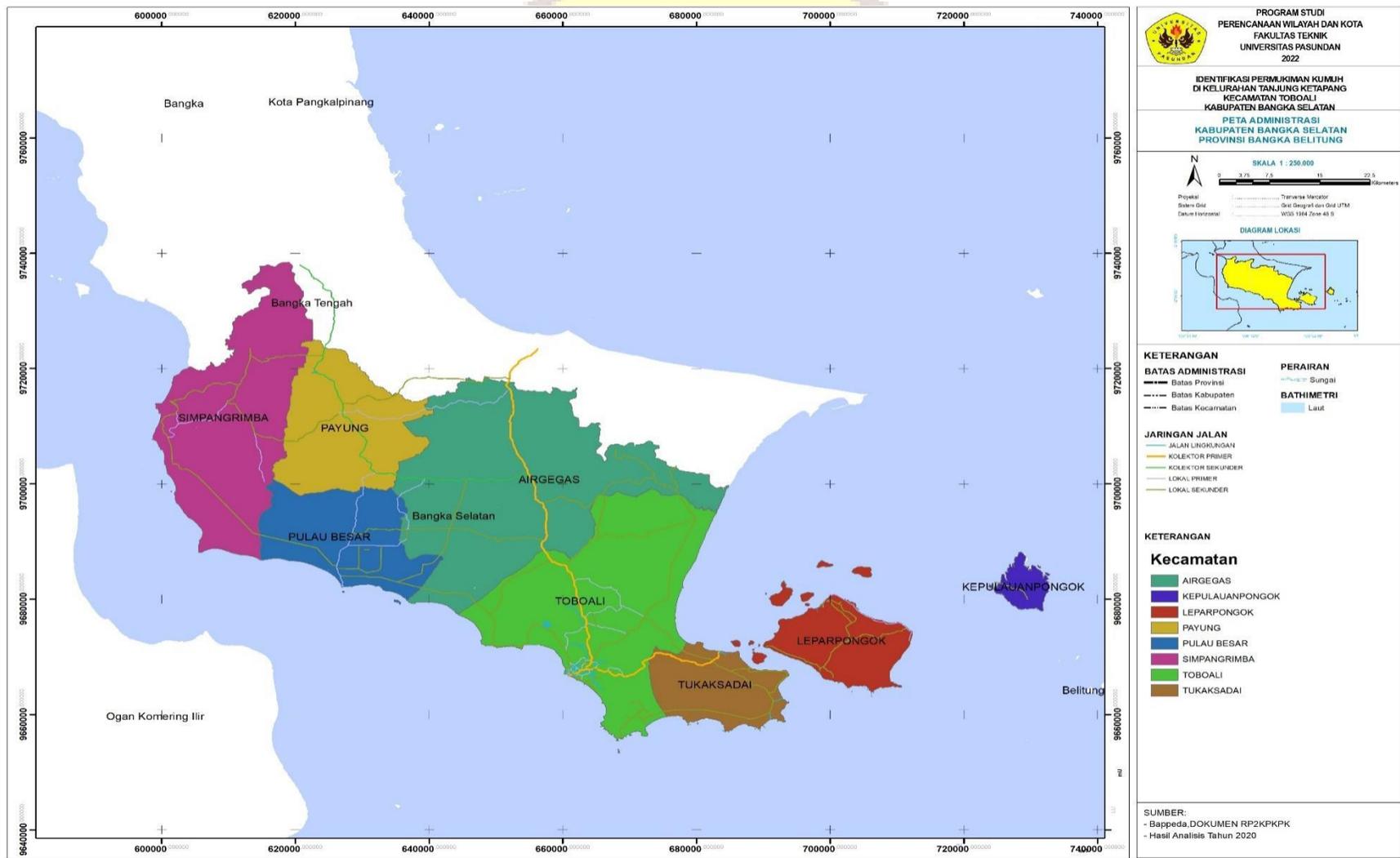
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

1.4.1.1 Ruang Lingkup Wilayah Eksternal

Kabupaten Bangka Selatan merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dan kecamatan di wilayah Bangka Selatan. Dengan seluas $\pm 3.607,08 \text{ Km}^2$ atau 360.708 Ha, Kabupaten Bangka Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Adapun wilayah administrasi Kabupaten Bangka Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Sungai Selan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Sebelah Timur : Selat Gaspar;
- Sebelah Selatan : Laut Jawa dan Selat Bangka;
- Sebelah Barat : Selat Bangka



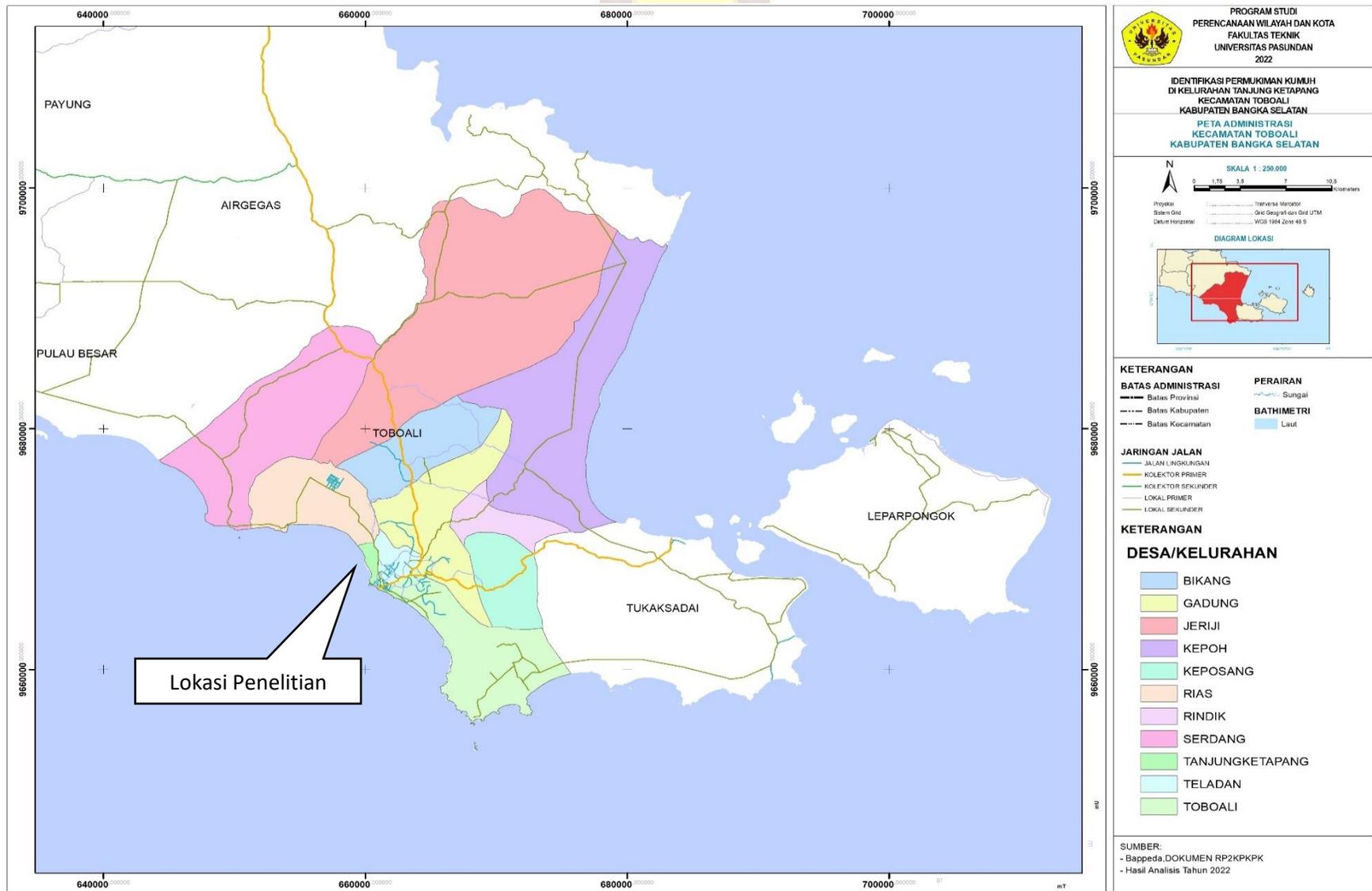
Gambar 1. 1 Peta Administrasi Bangka Selatan

1.4.1.2 Ruang Lingkup Wilayah Internal

Ruang Lingkup wilayah studi dari penelitian ini adalah Kelurahan Tanjung Ketapang yang terletak di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelurahan Tanjung Ketapang memiliki 7 RW dan jumlah luas wilayah sekitar 40 Km² yang memiliki jumlah penduduk sebesar 12.053 Jiwa. Secara letak administratif, Kelurahan Tanjung Ketapang berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Rias
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Teladan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Toboali





Gambar 1. 2 Peta Administrasi Kecamatan Toboali

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Adapun ruang lingkup substansi yang ada dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Mengidentifikasi Tingkat kekumuhan dalam infrastruktur yang ada di kelurahan Tanjung Ketapang .
 - a. Kondisi Bangunan Gedung
 - b. Kondisi Jalan Lingkungan
 - c. Kondisi Penyediaan Air Minum
 - d. Kondisi drainase Lingkungan
 - e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
 - f. Kondisi Pengelolaan Persampahan
 - g. Kondisi Proteksi Kebakaran
2. Mengidentifikasi Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Ketapang. Untuk mengetahui keadaan tingkat Pendidikan, tingkat pendapatan, dan Jenis pekerjaan dalam suatu masyarakat yang ada di dalam Kelurahan Tanjung Ketapang.
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Sosial Budaya

1.5 Metodologi

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

A. Pendekatan kualitatif

Merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) yang mendefinisikan bahwa kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistika.

Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan diperoleh signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti.

Dalam studi ini metode pendekatan yang digunakan yang terdiri dari metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif, berikut penjabarannya berdasarkan sasaran penelitian:

Tabel 1. 1 Metode Pendekatan Berdasarkan Sasaran

| No | Sasaran | Metode Pendekatan | Keterangan |
|----|---|----------------------------|---|
| 1. | Teridentifikasinya Tingkat kekumuhan dalam infrastruktur yang ada di kelurahan Tanjung Ketapang . | Kualitatif | Untuk menjawab sasaran 1, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur kelurahan dan pengelolaan dalam karakteristik yang ada dimasyarakat kelurahan tanjung ketapang. |
| 2. | Teridentifikasinya Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kawasan Tanjung Ketapang. | Kualitatif dan Kuantitatif | Untuk menjawab sasaran 2, pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi eksisting infrastruktur kelurahan Tanjung ketapang dalam bentuk kalimat, deskripsi dan angka. |

1.5.2 Variabel Penelitian

Matriks variabel penelitian merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta dengan indikator dan sumber yang digunakan sebagai acuan.

Tabel 1. 2 Variabel Penelitian

| No | Faktor Penelitian | Variabel Penelitian | Kriteria | Parameter | Sumber Acuan |
|----|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|
| 1. | Kondisi Fisik Wilayah | | a. Ketidakteraturan Bangunan | - Bangunan/rumah yang tidak memiliki keteraturan | - Permen PU No 14 Tahun 2018 - Santosa,2018 - Muhajir Syam (2017) |
| | | | b. Tingkat Kepadatan Bangunan | - Luas kawasan dengan kepadatan ≥ 250 unit/Ha | |

| No | Faktor Penelitian | Variabel Penelitian | Kriteria | Parameter | Sumber Acuan |
|----|-------------------|---------------------------------|---|---|--|
| | | Kondisi Bangunan Gedung | c. Ketidakesesuaian dengan persyaratan teknis Bangunan | <ul style="list-style-type: none"> untuk kota besar dan ≥ 200 unit/Ha untuk kota sedang/kecil Bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis bangunan (kecukupan luas, keamanan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan) | |
| | | Kondisi Jalan Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan b. Kualitas permukaan jalan lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> Panjang jalan lingkungan atau gang dengan struktur beton/paving/aspal) Panjang jalan dengan permukaan jalan rusak (yang sudah terstruktur aspal/paving block/beton) | <ul style="list-style-type: none"> Permen PUPR Permen PU No 14 Tahun 2018 Deysi Kaseke dkk, 2017 |
| | | Kondisi Penyediaan Air Minum | <ul style="list-style-type: none"> a. Ketidaksempurnaan akses aman minum b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum | <ul style="list-style-type: none"> Penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar) Penduduk yg belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari) | <ul style="list-style-type: none"> Permen PU No 14 Tahun 2018 Annas Anshar dkk, 2018 |
| | | Kondisi Drainase Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air b. Ketidaktersediaan Drainase c. Kualitas Kontruksi Drainase | <ul style="list-style-type: none"> Luas area yang terkena genangan (Genangan dengan $>30\text{cm}$, >2 jam, $> 2x$ per tahun) Panjang area yang tidak terlayani/tidak tersedia saluran/drainase lingkungan Panjang saluran drainase dengan kualitas konstruksi buruk | <ul style="list-style-type: none"> Permen PU No 14 Tahun 2018 |
| | | Kondisi Pengelolaan Persampahan | <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai Standar Teknis b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak sesuai dengan persyaratan Teknis | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK yang sistem pengolahan air limbahnya tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku Jumlah KK yang prasarana dan sarana pengolahan air limbahnya tidak memenuhi persyaratan teknis | <ul style="list-style-type: none"> Permen PU No 14 Tahun 2018 |
| | | Kondisi Pengelolaan Persampahan | a. Prasarana dan persampahan tidak sesuai dengan Persyaratan teknis | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah KK yang tidak memiliki sarpras persampahan sesuai syarat teknis dengan pendekatan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) | <ul style="list-style-type: none"> Permen PU No 14 Tahun 2018 Annas Anshar dkk, 2018 |

| No | Faktor Penelitian | Variabel Penelitian | Kriteria | Parameter | Sumber Acuan |
|----|-------------------|--|---|--|---|
| | | | b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis | - Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah yang tidak standar (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan) | |
| | | Kondisi Proteksi Kebakaran | a. Ketersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | - Jumlah bangunan yang tidak memiliki sistem pengamanan secara aktif dan pasif | - Permen PU No 14 Tahun 2018 |
| | | | b. Ketersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran | - Jumlah bangunan yang tidak memiliki pasokan air untuk kebutuhan proteksi kebakaran | - Annas Anshar dkk, 2018 |
| 2. | Faktor Penyebab | Kependudukan Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi | a. Tingkat Pertumbuhan Penduduk a. Tingkat Pendidikan b. Tingkat Pendapatan c. Pelayanan Kesehatan d. Jenis Pekerjaan | - - | - - Wimardana & Setiawan, 2016 - Putra & Andriana, 2017 |

Sumber: Penelitian 2023

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data berupa suatu teknik atau cara yang dilakukan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

A. Pengumpulan Data Primer

Melakukan survey lapangan tentang kondisi eksisting berkaitan dengan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Selatan. dalam untuk keperluan pengenalan karakteristik wilayah yang dalam penyusunan rencana harus dilakukan pengumpulan data primer yaitu Pengumpulan data primer berupa pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kota secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah kota dan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui para stakeholder terkait. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan Kabupaten Bangka Selatan sebagai yang Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Kondisi Fisik Kumuh Ringan Kumuh Sedang Kumuh Berat Keinginan Masyarakat Pemugaran Peremajaan Permukiman Kembali Teridentifikasinya kondisi fisik, karakteristik dan

keinginan masyarakat di kawasan kumuh Kelurahan Tanjung Ketapang Fenomena Kekumuhan dapat merusak Citra Kabupaten Bangka Selatan cara melakukan survey ke lapangan. Data ini diperoleh dengan cara observasi dan kuesioner.

- a. Observasi Data yang didapat dilakukan dengan observasi. Dimana hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tentang kondisi wilayah studi dengan menggunakan foto untuk memperoleh gambaran keadaan lingkungan dan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah studi.
- b. Survey Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data atau informasi yang data didapat ditujukan kepada narasumber yang terkait, antara lain BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dengan menggunakan alat recorder. Wawancara dilakukan untuk mencari atau mengetahui karakteristik dan isu di wilayah studi. Penjelasan mengenai data primer dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1. 3 Kebutuhan Data Primer

| Metode | Jenis Data | Data | Kegunaan | Sumber data |
|----------|---|---|--|----------------------------|
| Kuisoner | <ul style="list-style-type: none"> • Identitas Responden (Kepala/Anggota Keluarga) | <ul style="list-style-type: none"> • Nama • Jenis Kelamin • Usia • Pendidikan Terakhir • Pekerjaan • Pendapatan Perbulan • Asal (Penduduk asli atau bukan) • Lama tinggal di kelurahan Tanjung Ketapang • Alasan Tidak memenuhi • Persyaratan Tidak Kumuh • Keinginana masyarakat mengenai | <p>Mengetahui Identitas responden</p> <p>Untuk mengetahui keinginan dan harapan masyarakat</p> | Masyarakat dikawasan kumuh |
| | Keinginan dan harapan pemukim | | | |

| | | | | |
|------------------|---|--|---|--|
| | | <p>penanganan kawasan kumuh, meliputi beberapa pola penanganan ebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemugaran b. Peemajaan c. Permukim kembali | <p>mengenai penanganan Kawasan kumuh</p> | |
| Observasi/Survey | <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi fisik Kawasan Kumuh | <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Gedung • Kondisi Jalan Lingkungan • Kondisi Drainase • Sumber Air Minum • Pengelolaan Air Limbah • Pengelolaan Persampahan • Ketersediaan Sarana proteksi kebakaran | <p>Untuk mengetahui kondisi infrastruktur, sarana dan prsarana di kawasan kumuh</p> | <p>Masyarakat kawasan permukiman kumuh</p> |

B. Pengumpulan Data Sekunder

Melakukan survey ke instansi terkait mengenai kondisi kelembagaan yang menanganani kawasan permukiman kumuh dkabupaten Bangka Selatan (institusi, struktur organisasi, SDM dan tata laksana kerja organisasi), dukungan peraturan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten/ Kota di wilayah kajian yang berkaitan dengan kawasan permukiman kumuh di bangka selatan serta pengumpulan data lain yang relevan.

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan studi meliputi :

a) Data dasar

- Data demografi saat ini dan 10 tahun terakhir

- Data sosial ekonomi–karakteristik wilayah dan kependudukan
 - Data ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Kawasan Permukiman kumuh Eksisting
- b) Standar teknis
- Standar-standar teknis (SNI) yang berkaitan dan masih berlaku
- c) Referensi hukum dan dokumen pendukung lainnya
- RTRW Provinsi dan masing-masing Kabupaten/ Kota wilayah kajian
 - RDTR di wilayah kajian
 - RTBL di wilayah kajian

Data sekunder merupakan data diperoleh melalui literatur atau studi pustaka yang berkaitan dengan wilayah penelitian. Data sekunder juga dapat diperoleh dari instansi-instansi terkait berupa hardcopy maupun softcopy. Adapun data sekunder yang diperlukan dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1. 4 Kebutuhan Data Sekunder

| Instansi Terkait | Jenis Data | Kegunaan |
|---|--|--|
| BAPPEDA | <ul style="list-style-type: none"> • SK Kumuh Bupati Bangka Selatan • RTRW Kabupaten Bangka Selatan • Peta Guna Lahan | Untuk mengetahui teridentifikasi Tingkat Kekumuhan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Ketapang Kabupaten Bangka Selatan |
| Badan Pusat Statistik Dinas Pertanahan | <ul style="list-style-type: none"> • Kependudukan • Status tanah dan IMB di Kecamatan Taboali | - Untuk mengetahui legalitas kepemilikan tanah dan bangunan |
| Dinas Pekerjaan Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Peta sebaran jaringan jalan dan drainase | Untuk mengetahui persebaran jaringan jalan dan drainase |
| Kantor Kecamatan Taboali | <ul style="list-style-type: none"> • Peta Administrasi Kecamatan | Teridentifikasi Faktor Penyebab kelurahan Tanjung Ketapang Kabupaten Bangka Selatan |
| Kantor Kelurahan Tukak Sadai | <ul style="list-style-type: none"> • Kependudukan • Karakteristik fisik wilayah kelurahan Tanjung Ketapang • Karakteristik Sosial | |

- Peta batas administrasi
Kelurahan Tanjung
Ketapang

C. Standar Teknis Permukiman

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebijakan dalam menejemen permukiman yang sedang berkembang. Banyak pertumbuhan permukiman dan adanya beberapa permasalahan terkait dengan permukiman. Hal itu memicu adanya peraturan sebagaimana persyaratan teknis permukiman yang berlaku, beberapa persyaratan teknis permukiman dijelaskan sebagai berikut (UU No. 1 Tahun 2011) :

- 1) Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya.
- 2) Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain.
- 3) Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun.
- 4) Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah.
- 5) Dilengkapi dengan fasilitas air kotor/ tinja yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, ataupun tanki septik komunal.
- 6) Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.
- 7) Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan atau taman, tempat beribadat, pendidikan dan kesehatan sesuaidengan skala besarnya permukiman itu.
- 8) Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman ditentukan kewenangan pemerintah dalam mengelola permukiman. Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.

D. Standar Teknis Perumahan

Persyaratan teknis dalam pembangunan perumahan menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan lokasi lingkungan perumahan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat atau dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat, dengan kriteria sebagai berikut:

- Kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasitersebut bukan merupakan kawasan lindung (catchment area), olahan pertanian, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area bandara, daerah dibawah jaringan listrik tegangan tinggi.
- Kriteria kesehatan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasitersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam.
- Kriteria kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian(aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung), kemudian berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia
- Kriteria keindahan/ keserasian/ keteraturan (kompatibilitas), dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/ setu/ sungai/ kali dan sebagainya.
- Kriteria fleksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/ pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana.

- Kriteria keterjangkauan jarak, dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana-utilitas lingkungan.
- Kriteria lingkungan berjati diri, dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional/ lokal setempat.
- Lokasi perencanaan perumahan harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya, dan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan ekologis.

Keterpaduan antara tatanan kegiatan dan alam di sekelilingnya, dengan mempertimbangkan jenis, masa tumbuh dan usia yang dicapai, serta pengaruhnya terhadap lingkungan, bagi tumbuhan yang ada dan mungkin tumbuh di kawasan yang dimaksud. Pemahaman tentang permukiman berdasarkan kebijakan sebelumnya yaitu undang-undangan nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, menjelaskan bahwa definisi permukiman yaitu area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghunian dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.

Dalam pengertian pada UU No. 1 Tahun 2011, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sedangkan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (Undang-Undang No.1 Tahun 2011).

1.5.4 Metode Analisis

Metode analisis diperlukan dalam analisis data penelitian. Metode analisis menjelaskan mengenai teknik analisis data. Analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif. Metode ini merupakan metode analisis dengan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Dimana dalam penelitian ini metode analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menentukan tipologi kekumuhan permukiman di kabupaten bangka selatan.

Data yang diperoleh dari hasil survey dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data secara sistematis dan akurat terhadap hasil pembobotan/penilaian mengenai permukiman kumuh berdasarkan kriteria-kriteria. Variabel penelitian ini digunakan untuk menjawab sasaran teridentifikasinya Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Taboali Kabupaten Bangka Selatan. Terdapat beberapa variabel dan yang dapat digunakan sebagai penentuan permukiman kumuh yakni kondisi fisik (kondisi bangunan, kondisi jalan, kondisi drainase, kondisi air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan ketersediaan fasilitas proteksi kebakaran). Untuk lebih jelasnya mengenai hal-hal parameter pada variable kriteria penentuan Kawasan permukiman kumuh yang akan dianalisis dapat dilihat pada sebagai berikut ini:

Tabel 1. 5 Parameter pada Variabel Kriteria Penentuan Kawasan Permukiman Kumuh

| Kriteria | Variabel | Parameter/Indikator |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| Vitalis Non Ekonomi | Kondisi fisik bangunan | >100 unit/ha |
| | Kepadatan bangunan | 80-100 unit/ha |
| | | <80 unit/ha |
| | Bangunan temporer | >50% |
| | | 25% - 50% |
| | Building coverage | <25% |
| | >70% | |
| | 50% - 70% | |
| | <50% | |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 1,5 m |
| | Jarak antara bangunan | 1,5m - 3m |
| | | >3m |
| Kondisi | | >500 jiwa/ha |
| Kependudukan | Kepadatan Penduduk | <400 jiwa/ha |
| | | <400 jiwa/ha |
| | | >2,0% |
| | Pertumbuhan penduduk | 17% - 2% |
| | | <1,7% |
| Kondisi Prasarana Sarana | Kondisi jalan lingkungan | Sangat buruk > 70% |
| | | Buruk 50% - 70 % |
| | | Baik <50% |
| | Kondisi Drainase | Genangan >50% |
| | | Genangan 25% - 60% |
| | | Genangan 25% |
| | Kondisi Air Minum | Pelayanan <30% |
| | | Pelayanan 30% - 60% |
| | | Pelayanan >60% |
| | Kondisi Air Limbah | Pelayanan <30% |
| Pelayanan 30% - 60% | | |
| Pelayanan >60% | | |
| Kondisi Persampahan | Pelayanan <50% | |
| | Pelayanan 50% - 70% | |
| | | Pelayanan >70% |

Sumber : Permen PU No 14 Tahun 2018

- **Skoring**

Penilaian dalam penentuan skala prioritas penanganan Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Tanjung Ketapang Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan tingkat kekumuhan (fisik). Perhitungan total penilaian setiap indikator didekati dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$Si = \frac{\sum Bi}{\sum P}$$

Keterangan :

Si = Total Skor pada Setiap Indikator, Bi = Skor
Sub Kriteria, P = Jumlah Sub Kriteria

Klasifikasi Tingkat Kekumuhan

Berikut merupakan rentang nilai tingkat klasifikasi yang didapatkan untuk setiap kelas yakni:

Bukan Kawasan Kumuh : 0 – 8,75

Kawasan Kumuh Ringan : 8,76 – 17,50

Kawasan Kumuh Sedang : 17,51 – 26,25

Kawasan Kumuh Berat : 26,26

Sumber: Permen PU No 14 Tahun 2018

- **Kuisoner**

Hasil pengolahan data yang diperoleh akan di analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2010) analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan membantu dalam menyimpulkan harapan serta keinginan masyarakat di kawasan kumuh di Kelurahan Tanjung Ketapang. Kuisoner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Kuisoner yang dibuat ditujukan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pemanfaatan dan penggunaan infrastruktur pedesaan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Ketapang.

- **Analisis Kependudukan**

Analisis sosial demografi bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai aspek-aspek kependudukan, terutama yang memiliki pengaruh timbal balik dengan perkembangan

sosial dan ekonomi, seperti: kondisi demografi wilayah perencanaan saat ini (laju pertumbuhan, jumlah dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama, angkatan kerja, kepadatan penduduk, dependensi rasio dan struktur matapencaharian) dan proyeksi atau perkiraan kondisinya pada waktu 5 tahun ke depan. Analisis sosial demografi merupakan masukan dalam penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana wilayah, rencana penyebaran/distribusi penduduk tiap blok/unit lingkungan, dan kepadatan Penduduk.

1. Kepadatan Penduduk

Tingkat Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah dalam satuan hektar (Ha) pada batas wilayah administrasi tertentu. Semakin padat penduduk pada suatu wilayah mengakibatkan semakin terhadap sumber daya dan daya dukung fisik lingkungan yang ada pada wilayah tersebut. Adapun perhitungan pada tingkat kepadatan penduduk adalah dengan membandingkan banyaknya penduduk dengan luas wilayah administrasi kelurahan (Ha). Teknik Penilaian adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk dalam suatu wilayah}}{\text{Jumlah Luas wilayah (Ha)}} \times 100\%$$

2. Rata-Rata Anggota Rumah Tangga

Rata-rata anggota rumah tangga atau besarnya anggota rumah tangga adalah rata-rata banyaknya anggota keluarga pada tiap-tiap kepala keluarga (KK). Anggota rumah tangga ini menunjukkan banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan KK tersebut. Semakin besar rata-rata ukuran rumah tangga menunjukkan semakin besarnya tingkat konsumsi barang maupun jasa pada keluarga tersebut, misalnya konsumsi listrik dan air akan lebih besar pada keluarga yang memiliki ukuran keluarga yang lebih besar. Perhitungan rata-rata anggota rumah tangga dinilai dengan membandingkan jumlah penduduk keseluruhan dengan jumlah seluruh KK. Teknik Penilaiannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Seluruh Penduduk dalam suatu wilayah}}{\text{Jumlah Luas KK}} \times 100\%$$

3. Jumlah Kepala Keluarga Per Rumah /Bangunan

Jumlah KK perumahan adalah perbandingan antara jumlah KK pada suatu wilayah dengan jumlah bangunan rumah. Semakin tinggi angka perbandingan KK dengan bangunan rumah ini menunjukkan semakin banyak jumlah anggota keluarga, yang pada gilirannya berpengaruh pada kebutuhan sarana pelayanan yang semakin besar. Perhitungan jumlah KK per rumah / bangunan adalah perbandingan jumlah KK pada suatu wilayah dengan jumlah rumah pada wilayah tersebut. Teknik penilaiannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah KK dalam suatu wilayah}}{\text{Jumlah Bangunan Rumah}} \times 100\%$$

4. Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk adalah penambahan penduduk tiap tahun pada suatu wilayah yang dilihat dari jumlah penduduk pada awal tahun dan akhir tahun tiap 1000 penduduk. Perhitungan tingkat pertumbuhan penduduk membandingkan jumlah pertumbuhan penduduk dalam satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama dikalikan 100% Teknik Penilaiannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Tahun Akhir} - \text{Jumlah Penduduk Tahun Awal}}{\text{Jumlah Penduduk Tahun Awal}} \times 100\%$$

- **Teknik analisis yang digunakan untuk menghitung perkiraan laju pertumbuhan penduduk.**

Perkiraan laju pertumbuhan penduduk diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah, untuk: (i) memperkirakan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dibutuhkan selama kurun waktu pelaksanaan rencana, dan (ii) merubah kecenderungan laju pertumbuhan penduduk dalam rangka menanggulangi dinamika penduduk yang terlalu pesat. Pertumbuhan

penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh: (1) besarnya kelahiran, (2) besarnya kematian, dan (3) besarnya migrasi masuk dan migrasi keluar.

Keadaan penduduk pada tahun tertentu dapat dilukiskan sebagai berikut:

$$P_t = P_0 + \{B - D\} + \{M - M_0\}$$

Dengan :

P_t = Jumlah Penduduk pada tahun t

P_0 = Jumlah Penduduk Pada tahun dasar

B = Jumlah Kelahiran

D = Jumlah Kematian

M_i = Jumlah Kematian

M_o = Jumlah Migrasi keluar

$(B-D)$ = Pertumbuhan Penduduk alamiah

(M_i-M_o) = Pertumbuhan penduduk migrasi (neto)

• Analisis Sarana dan Prasarana

Analisis sarana dan prasarana dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap:

- a) Kondisi sarana prasarana yang ada (eksisting) yang meliputi antara lain sarana dan prasarana transportasi, pengairan/irigasi, energi/listrik, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan, jaringan jalan, drainase, air bersih, air limbah, dan persampahan.
- b) Kondisi tingkat pelayanan atau pemanfaatan sarana prasarana seperti tersebut di atas dalam mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas atau daya dukung lingkungan wilayah perencanaan.
- c) Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana, dengan mengacu kepada standar kebutuhan sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana yang dimaksudkan di sini adalah: transportasi, energi, pengelolaan lingkungan, jaringan jalan, drainase, air bersih, air limbah, dan persampahan. Seluruh kebutuhan sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kawasan untuk masa 20 tahun ke depan menurut hasil proyeksi penduduk.

- **Analisis Sarana**

Guna mendapatkan hasil Kebutuhan sarana dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, penulis menggunakan standar nasional Indonesia SNI 03-1733 Tahun 2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan Perumahan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$S(n) = \frac{P(n)}{S_m}$$

Dimana :

S(n) = Jenis Sarana berdasarkan standart

Pn = Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi

S_m = Standart minimum hasil dari perhitungan data tersebut dikurangi dengan jumlah eksisting sarana yang ada.

Untuk menghitung tingkat pelayanan menggunakan :

$$\text{Jumlah yang seharusnya} = \frac{\text{jumlah penduduk}}{\text{Standart penduduk pendukung}}$$

$$\text{Jumlah yang seharusnya} = \frac{\text{jumlah yang ada}}{\text{jumlah yang seharusnya}} \times 100$$

Sumber: Permen PU No. 14 Tahun 2010

- **Metode Pengambilan Sample**

Metode Pengambilan Sample Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2011). Dengan demikian sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa mewakili keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kepala keluarga di Kelurahan Tanjung Ketapang yang berjumlah 423 kk. Dalam penelitian ini pun penulis mempersempit populasi yaitu jumlah kepala keluarga di Kelurahan Tanjung Ketapang sebanyak 423 kk dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut (Sugiyono, 2011). Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

E = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e=0,1

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut:

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Solvin adalah antara 10-20 % dari populasi penelitian.

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 423 kk, sehingga persentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{423}{1+423 (10)^2}$$

$$n = \frac{423}{1+423 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{423}{1+423 \times 0,01)^2}$$

$$n = \frac{423}{1+4,23}$$

$$n = \frac{423}{1+4,23}$$

$$n = \frac{423}{5,23} = 80,8 \approx 80 \text{ kk}$$

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 80 kepala keluarga atau sekitar 17% dari seluruh total kepala keluarga di Kelurahan Tanjung Ketapang . Untuk sebaran responden (80 kk) di dijelaskan pada Tabel 1.6 sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Jumlah Responden (Kepala Keluarga) Menurut diKelurahan Tanjung Ketapang

| No | Kategori | Jumlah KK (kepala Keluarga) | Jumlah Responden (Kepala Keluarga) |
|---------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Tidak Memiliki Keteraturan Bangunan | 98 | 19 |
| 2 | Tidak Memiliki IMB | 101 | 48 |
| 3 | Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum | 68 | 8 |
| 4 | Tidak Memiliki MCK | 9 | 2 |
| 5 | Sarana & Prasarana Pengolahan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | 11 | 3 |
| <i>Jumlah</i> | | | 80 |

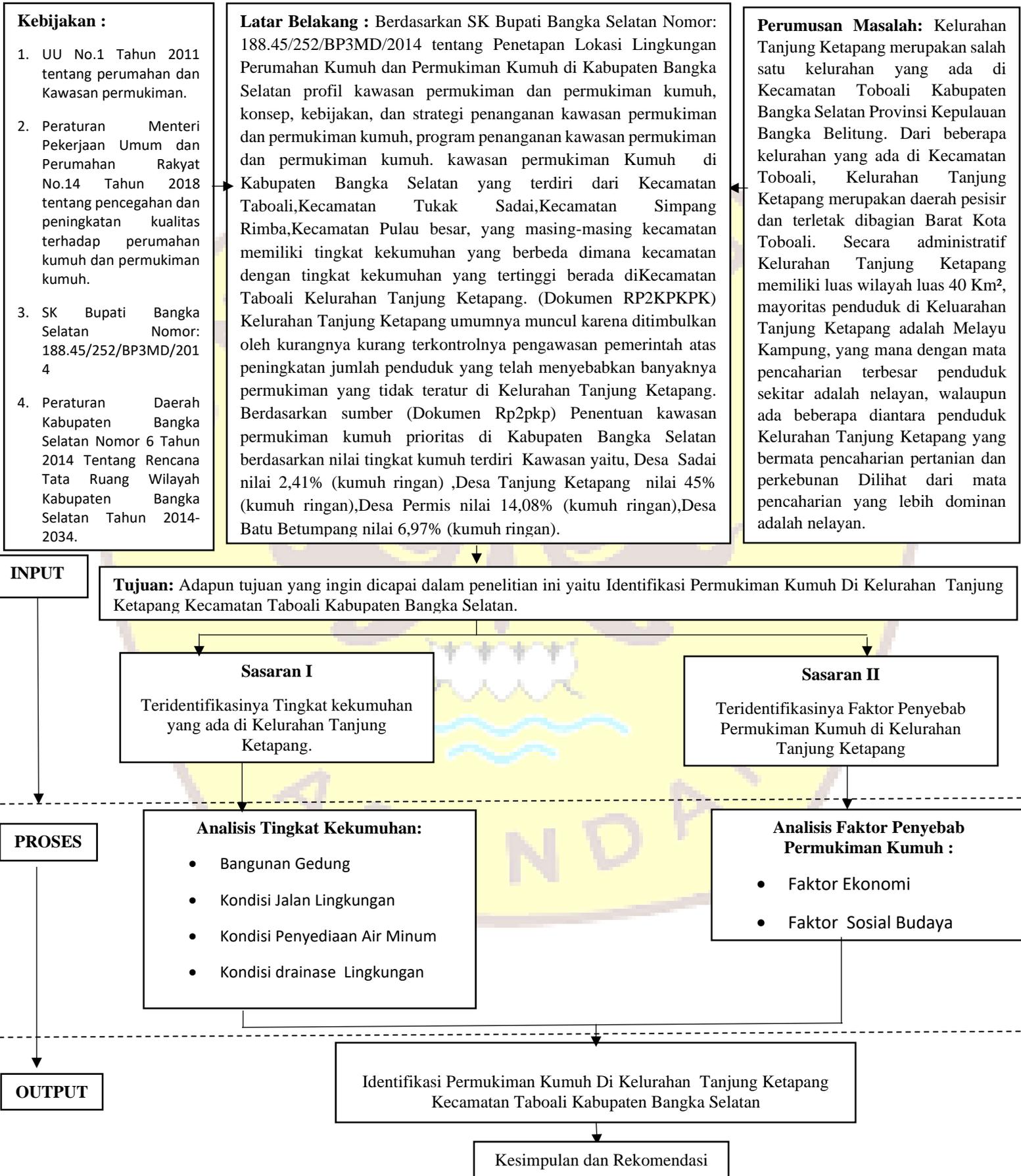
Sumber: Hasil analisis, 2020

Sampel yang diambil berdasarkan teknik probability sampling; simple random sampling, dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi (kepala keluarga yang terdampak langsung dari fenomena kekumuhan) untuk dipilih menjadi sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri.



1.6 Kerangka Pikir

Gambar 1. 3 Bagan Kerangka Pikir



1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami laporan ini, maka rencana penulisan laporan ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup wilayah, dan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Bagian ini berisikan mengenai tinjauan teori – teori yang ada atau kajian pustaka yang berkaitan dengan aspek tersebut.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Taboali Kabupaten Bangka Selatan sebagai Identifikasi Permukiman Kumuh.

BAB IV ANALISIS IDENTIFIKASI PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN TANJUNG KETAPANG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil analisis yang didapat dari beberapa sumber data yang diperoleh yang berhubungan dengan penelitian yang hasil pengolahan data tersebut kemudian diidentifikasi untuk mengetahui permasalahannya.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan serta keterbatasan studi dan rekomendasi studi lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kebijakan/Lembaga

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,

Permen PU No 14 Tahun 2018

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan

B. Buku

Buku Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kab Bangka Selatan 2019-2020

Buku Pengembangan Kawasan Permukiman dalam PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN.2019.Panduan Kualitas visual Infrastruktur bidang cipta Karya

C. Jurnal

Andas Budy, F. (2016). Penataan Kawasan Pemukiman Kumuh Kelurahan. *Jurnal Losari (Jurnal Arsitektir Kota Dan Permukiman)*, Volume 1 Nomor 2 .

Arief R. Wismansyah, M. S. (2019). Dynamic System Development:An Approach for Land Re-adjustment inManaging Slum Areas. *KnE Social Sciences*, 3(21), 83-95.

B, N. R. (2015). KAJIAN KARAKTERISTIK KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG KOTA. *Jurnal Teknik PWK* , 4(2), 267-281.

D, A. A. (2018). Arahan Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kedungcowek Surabaya Menggunakan Konsep Land Readjustment. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2), 186-192.

D, M. (2020). STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TANAH DATAR KECAMATAN PEKANBARU KOTAKOTA PEKANBARU. *Jurnal Ilm Lingkungan*, 14(01).

Hariyono, P. (2010). *Perencanaan pembangunan kota dan perubahan paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelahar.

Krisandriyana M, A. W. (2019). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERADAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI SURAKARTA. *Jurnal Desa Kota*, 1(1), 24-33.

- N, S. D. (2022). ANALISIS KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PEMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELAWAN BAHAGIA, KECAMATAN MEDAN BELAWAN. *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 05(01).
- Nauval Kamil R, N. S. (2021). PENGENDALIAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) OLEH SATUAN KERJA KOTA DI KOTA BANDUNG CONTROLLING OF KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) PROGRAM BY CITY WORK UNITS IN BANDUNG CITY. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1).
- Nursyahbani, B. P. (2015). KAJIAN KARAKTERISTIK KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG KOTA. *Jurnal Teknik PWK*, Volume 4, No 2.
- Parfi, I. M. (2014). IDENTIFIKASI PERMUKIMAN KUMUH DI PUSAT KOTA JAMBI IDENTIFICATION OF SLUMS AREA IN THE CENTER OF JAMBI CITY. *Jurnal Ruang*, 2(4), 301-310.
- Rahmad Zulkarnaini W, T. S. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BUKITTINGGI. *Jurnal Planologi*, 16(2).
- Rindarjono. (2012). *SLUM : Kajian Pemukiman Kumuh dalam Perpektif Spasial*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Sabila F, C. I. (2021). IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI BANTARAN SUNGAI KRUENG DAROY. *Journal of Architecture*, 11(02).
- Solehati D, I. M. (2017). IDENTIFIKASIKARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH GAMPONGTELAGA TUJUH, KOTA LANGSA, ACEH. *Jurnal Teknik Sipil*, 1(2), 349-358.
- Suci, N. W. (2022). STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI
- Wimardana A S, S. R. (2016). Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitug Selatan, Kota Banjarmasin. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2), 1-6.
- Wulan, S. N. (2022). STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI
- Yustiani, e. a. (2021). PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERINTEGRASI DI KOTA SEMARANG. *The Indonesian Journal of Public Administration*,